

Buku Saku
— Identifikasi
dan Penilaian
Lokasi Kumuh



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

KATA PENGANTAR

Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat di lingkungan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kegiatan KOTAKU ini mengusung konsep peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berketahanan.

Untuk memastikan tercapainya kualitas hasil pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan standar teknis dan penyelenggaraan IBM berjalan dengan baik, maka disusun pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 13/SE/DC/2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Cipta Karya yang tata kelola pelaksanaannya dirincikan ke dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan KOTAKU.

Selaras dengan pedoman teknis tersebut, maka telah disusun pula kumpulan buku saku yang bertujuan untuk mendukung kelancaran dan kemudahan bagi tim pelaksana di lapangan. Buku saku tersebut berisi rincian terkait mekanisme pengendalian, perencanaan dan pembangunan fisik yang terdiri dari:

1. Buku Saku Pengendalian KOTAKU
2. Buku Saku Petunjuk Umum Konstruksi;
3. Buku Saku Petunjuk Konstruksi Jalan;
4. Buku Saku Petunjuk Konstruksi Air Minum;
5. Buku Saku Petunjuk Konstruksi Drainase;
6. Buku Saku Petunjuk Konstruksi Sanitasi;
7. Buku Saku Petunjuk Proteksi Kebakaran;

8. Buku Saku Penyelenggara Swakelola KOTAKU;
9. Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh;
10. Buku Saku Pemanfaatan dan Pemeliharaan kegiatan IBM Direktorat PKP;
11. Buku Saku Penentuan Luas Capaian Luas Kawasan Terlayani Infrastruktur Terbangun; dan
12. Buku Saku Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Informasi Laporan Keuangan dan Aset kegiatan IBM Direktorat PKP.

Diharapkan dengan adanya kumpulan buku saku ini dapat menjadi panduan praktis bagi para pelaku kegiatan KOTAKU Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman di lapangan, mulai dari tahap persiapan hingga pasca pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai pedoman/standar yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan kontribusi positif terhadap penerapan aturan/kaidah teknis pada pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Namun demikian, tim penulis tetap mengharapkan saran dan kritikan dari seluruh pemakai buku saku ini untuk penyempurnaan lebih lanjut secara substansi.

Jakarta, Maret 2022

**Tim Pengawasan dan Pengendalian Pusat
Kegiatan IBM Direktorat PKP**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Landasan Dan Rujukan	2
II. GAMBARAN UMUM.....	3
2.1 Definisi Permukiman Kumuh.....	3
2.2 Aspek Dan Kriteria Kekumuhan	4
2.3 Rincian Kriteria Kekumuhan Per Aspek	5
2.3.1 Identifikasi Kondisi Kekumuhan	5
2.3.2 Identifikasi Legalitas Lahan.....	9
2.3.3 Identifikasi Pertimbangan Lain	10
III. IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN KUMUH	11
3.1 Persiapan	11
3.2 Pelaksanaan	11
3.3 Perhitungan Numerik Kumuh	17
3.3.1 Kebutuhan Data numerik	17
3.3.2 Rumus Perhitungan Numerik Kumuh.....	22
3.3.3 Data Isian Indikator Numerik Kekumuhan	26

3.4	Perhitungan Tingkat Kekumuhan	29
3.4.1	Perhitungan Dari Kondisi Kekumuhan	29
3.4.2	Perhitungan Dari Segi Legalitas Lahan	34
3.4.3	Perhitungan Dari Segi Pertimbangan Lain	35
3.4.4	Penentuan Skala Penanganan Prioritas	37
3.4.5	Tingkat Kekumuhan Awal	40
IV.	SIMULASI IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN KUMUH	43
V.	PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Aspek dan Kriteria Kekumuhan	4
Tabel 2. 2 Rincian Kriteria Kekumuhan Per Aspek	5
Tabel 3. 1 Rincian Waktu Pelaksanaan Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh.....	16
Tabel 3. 2 Kebutuhan Data Numerik Kumuh.....	17
Tabel 3. 3 Rumusan Perhitungan Numerik Kumuh.....	22
Tabel 3. 4 Data Isian Indikator Numerik Kekumuhan.....	26
Tabel 3. 5 Perhitungan Tingkat Kekumuhan dari Segi Kondisi Kekumuhan.....	29
Tabel 3. 6 Perhitungan Tingkat Kekumuhan dari Segi Legalitas Lahan	34
Tabel 3. 7 Perhitungan Tingkat Kekumuhan dari Segi Pertimbangan Lain.....	35
Tabel 3. 8 Formula Penentuan Skala Penanganan Prioritas.....	37
Tabel 3. 9 Tingkat Kekumuhan Awal	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Tahapan Identifikasi dan Penilaian Lokasi	14
---	----

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Melalui kegiatan pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur permukiman di wilayah permukiman kumuh perkotaan diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasikan Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) mempercepat pengurangan luas permukiman kumuh, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin atau MBR di lokasi permukiman kumuh. Kegiatan KOTAKU dilaksanakan dengan pola kegiatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

Identifikasi dan penilaian kawasan kumuh ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditangani melalui survei pada perumahan dan permukiman kumuh dan penyusunan format numerik serta penyusunan skenario penanganan kumuh. Kegiatan ini diharapkan menjadi acuan dalam pencapaian target kegiatan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh.

1.2 TUJUAN

Secara umum, tujuan dari kegiatan identifikasi dan penilaian lokasi kumuh yaitu untuk mendapatkan titik lokasi dan jenis infrastruktur prioritas penanganan kumuh yang tepat sasaran dan sesuai indikator keberhasilan kinerja KOTAKU.

1.3 LANDASAN DAN RUJUKAN

Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh disusun berlandaskan dan merujuk pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

II. GAMBARAN UMUM

2.1 DEFINISI PERMUKIMAN KUMUH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, definisi permukiman yaitu sebagai berikut:

- a) Pasal 1 ayat 5, Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
- b) Pasal 1 ayat 6, Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- c) Pasal 18 ayat 1, Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- d) Pasal 18 ayat 1, Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - i. bangunan gedung;
 - ii. jalan lingkungan;
 - iii. penyediaan air minum;
 - iv. drainase lingkungan;
 - v. pengelolaan air limbah;
 - vi. pengelolaan persampahan; dan
 - vii. proteksi kebakaran.

2.2 ASPEK DAN KRITERIA KEKUMUHAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh bahwa terdapat 7 (tujuh) aspek kekumuhan dan 16 (enam belas) indikator yang akan menjadi acuan dalam penyusunan baseline dan penilaian tingkat kekumuhan.

Tabel 2. 1 Aspek dan Kriteria Kekumuhan

ASPEK (7)	KRITERIA (16)
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan bangunan
	Tingkat Kepadatan Bangunan
	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air
	Ketidaksediaan Drainase
	Kualitas Konstruksi Drainase
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaksediaan Prasarana Proteksi Kebakaran
	Ketidaksediaan Sarana Proteksi Kebakaran

2.3 RINCIAN KRITERIA KEKUMUHAN PER ASPEK

Setiap aspek dan kriteria kekumuhan memiliki indikator yang merupakan basis survei dalam penyusunan *input* baseline kekumuhan. Indikator kekumuhan tersebut adalah sebagai berikut.

2.3.1 IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN

Tabel 2. 2 Rincian Kriteria Berdasarkan Kondisi Kekumuhan

No	Kriteria	Indikator
A. Aspek Bangunan Gedung		
1	Ketidakteraturan Bangunan	a. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau b. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
2	Tingkat Kepadatan Bangunan yang Tinggi yang Tidak Sesuai Dengan	a. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; b. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau c. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none">• untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha

	Ketentuan Rencana Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha
3	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian dampak lingkungan b. Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum c. Kesehatan bangunan gedung d. Kenyamanan bangunan gedung e. Kemudahan Bangunan Gedung
B. Aspek Jalan Lingkungan		
1	Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman (cakupan pelayanan)	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis
2	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman
C. Aspek Penyediaan Air Minum		
1	Akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa

2	Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari
D. Aspek Drainase Lingkungan		
1	Drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan
2	Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun
3	Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan
E. Aspek Pengelolaan Air Limbah/Sanitasi		
1	Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu, kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat
2	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: a. Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik;

	memenuhi persyaratan teknis	b. tidak tersedianya pengelolaan limbah setempat atau terpusat
F. Aspek Pengelolaan Persampahan		
1	Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik tau rumah tangga; b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan; c. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan
2	Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none"> a. pewadahan dan pemilahan domestik; b. pengumpulan lingkungan; c. pengangkutan lingkungan; d. pengelolaan lingkungan
G. Aspek Proteksi Kebakaran		
1	Prasarana kebakaran proteksi tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan;

		3. sarana komunikasi; dan/atau; 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;
2	Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau mobil tangga sesuai kebutuhan
Jika terdapat pemadam kebakaran dengan radius 5km dari kawasan permukiman kumuh maka dinyatakan sudah terpenuhi dari Aspek Proteksi Kebakaran dan tidak ada penanganan terkait aspek tersebut.		

2.3.2 IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN

Tabel 2. 3 Rincian Kriteria Berdasarkan Kondisi Kekumuhan

a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemanfaat tanah.
b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).

2.3.3 IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN

Tabel 2. 4 Rincian Kriteria Berdasarkan Kondisi Kekumuhan

1. Nilai strategis lokasi	Letak lokasi perumahan atau permukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten/kota; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota
2. Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151–200 jiwa/ha; 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201–400 jiwa/ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;
3. Kondisi sosial, ekonomi dan budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; 3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

III. IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN KUMUH

3.1 PERSIAPAN

Terdapat beberapa hal yang dibutuhkan sebelum melakukan Identifikasi dan Penilaian Kumuh, yaitu sebagai berikut:

- Baseline numerik untuk lokasi Kumuh Kota/Kabupaten;
- Berita Acara Pertemuan Warga I yang memuat daftar usulan lokasi rencana penanganan kumuh di kelurahan/desa sasaran;
- SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota/Kabupaten;
- Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan;
- Dokumen RP2KPKP; dan
- Dokumen pendukung lainnya yang dapat digunakan dalam proses identifikasi dan penilaian lokasi kumuh.

3.2 PELAKSANAAN

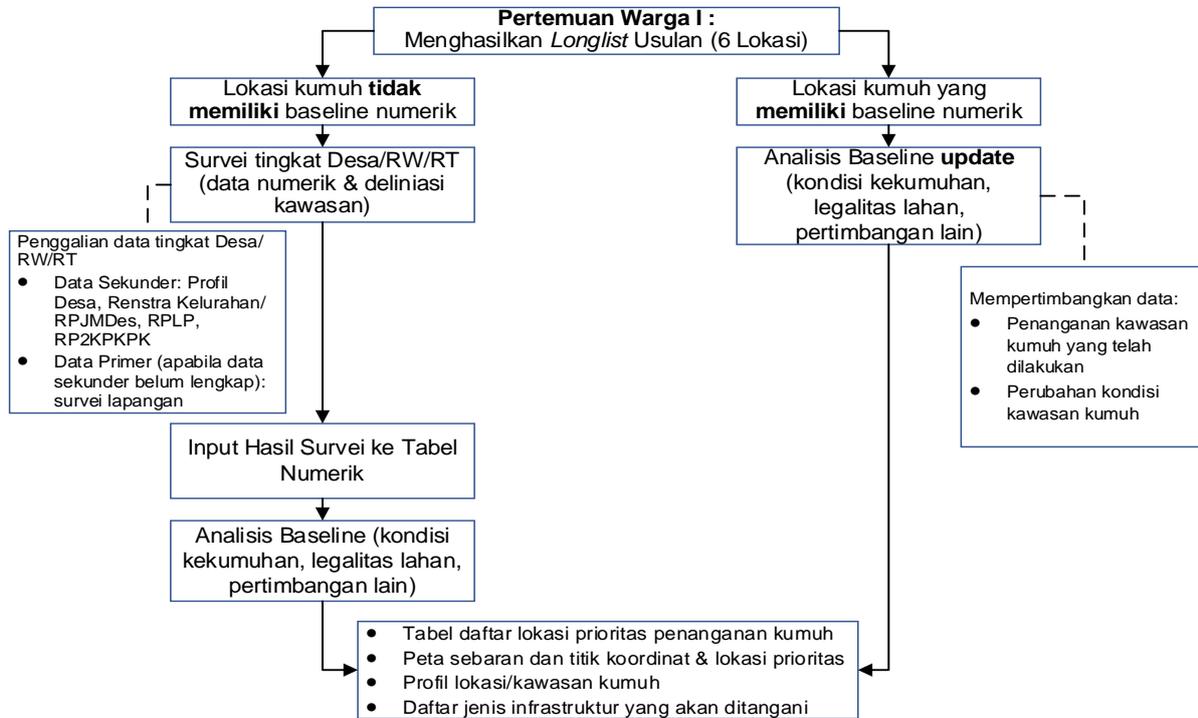
Langkah awal yang dilaksanakan oleh Fasilitator Masyarakat untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam melakukan Identifikasi dan Penilaian Kumuh adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dengan Pokja PKP kota/kabupaten dan Penyelenggara Swakelola untuk melakukan Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh hasil usulan Pertemuan Warga I;
- 2) Melakukan analisis data baseline numerik mengenai kondisi 7 (tujuh) kriteria aspek kekumuhan, yaitu kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran beserta kebutuhan infrastruktur penanganannya. Dalam hal ini, beberapa kondisi yang perlu diperhatikan:

- Apabila lokasi kumuh usulan tidak memiliki data baseline numerik, maka FM dan penyelenggara swakelola melakukan penghitungan baseline numerik dengan instrumen penghitungan yang sesuai.
 - Apabila desa/kelurahan sasaran KOTAKU IBM pernah mendapatkan bantuan penanganan kumuh pada tahun-tahun sebelumnya dan luasan kumuhnya telah dinyatakan 0 (nol) hektar dalam Berita Acara Kesepakatan Perhitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Kota/Kabupaten, maka FM dan penyelenggara swakelola melakukan penghitungan baseline numerik pada kawasan RT/RW yang belum ditangani.
- 3) Melakukan survei lapangan ke lokasi-lokasi hasil usulan pada Pertemuan Warga I untuk meninjau kondisi 7 (tujuh) kriteria aspek kekumuhan dan kondisi infrastruktur eksisting;
 - 4) Menyusun peta delineasi kawasan kumuh;
 - 5) Melakukan pengecekan terkait legalitas tanah.
 - a. Kejelasan status penguasaan lahan; dan
 - b. Kesesuaian Rencana Tata Ruang.
 - 6) Melakukan penilaian terhadap pertimbangan lain:
 - a. Nilai strategis lokasi;
 - b. Kependudukan; dan
 - c. Kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
 - 7) Melakukan penentuan skala prioritas penanganan kumuh berdasarkan hasil penilaian kondisi kekumuhan, legalitas tanah, dan pertimbangan lain;
 - 8) Melakukan penyusunan:
 - a. Tabel Daftar Lokasi Prioritas Penanganan Kumuh, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan;
 - b. Peta Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Prioritas Penanganan Kumuh;
 - c. Profil Lokasi Kumuh yang berisi hasil pendataan dan penilaian

- lokasi (format daftar numerik); dan
- d. Daftar jenis infrastruktur yang akan ditangani dan rencana pemenuhan Readiness Criteria.

Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh yang tidak memiliki data baseline numerik dan lokasi yang memiliki data baseline numerik memiliki perbedaan tahapan sesuai pada diagram di bawah ini:



Gambar 3. 1 Tahapan Identifikasi dan Penilaian Lokasi

Pada dasarnya, lokasi kumuh yang telah ditetapkan untuk ditangani secara ideal termuat dalam SK Kumuh Kota/Kabupaten. Namun, terdapat lokasi kumuh yang ditetapkan tidak termuat dalam SK Kumuh Kota/Kabupaten. Kepemilikan data baseline numerik tidak mengacu pada termuatnya lokasi tersebut ke dalam SK Kumuh, karena beberapa lokasi yang telah ditetapkan dan termuat dalam SK Kumuh Kota/Kabupaten tidak memiliki data baseline numerik.

Lokasi kumuh yang memiliki data baseline numerik secara langsung dapat melaksanakan identifikasi dari baseline yang telah tersedia, sehingga hanya perlu melakukan survei infrastruktur terbangun pada lokasi sasaran sebagai verifikasi terhadap data numerik yang ada. Untuk Lokasi kumuh yang tidak memiliki baseline numerik harus melakukan penghitungan data baseline numerik dengan beberapa instrumen seperti wawancara tingkat Desa/RW/RT, FGD dan survei lapangan.

Penghitungan data baseline numerik juga dilakukan untuk lokasi kumuh yang luasan kumuhnya telah dinyatakan 0 (nol) hektar dalam Berita Acara Kesepakatan Perhitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh yang disepakati dan ditandatangani oleh Pokja PKP Kota/Kabupaten. Perlu diketahui lebih lanjut terkait jenis infrastruktur yang dibangun melalui kegiatan KOTAKU sebelumnya pada desa/kelurahan yang dimaksud, sebagai pertimbangan dalam melakukan deliniasi ulang dan penentuan jenis infrastruktur yang akan dibangun pada tahun berjalan.

Waktu yang diperlukan untuk melakukan identifikasi dan penilaian lokasi kumuh baik lokasi yang memiliki baseline numerik maupun tidak memiliki baseline numerik masing maksimal adalah 14 hari. Berikut adalah rincian waktu yang diperlukan untuk identifikasi dan penilaian lokasi kumuh:

Tabel 3. 1 Rincian Waktu Pelaksanaan Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh

Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh	Waktu
Lokasi kumuh tidak memiliki baseline numerik	
Survei tingkat Desa/RW/RT (data numerik & deliniasi kawasan)	5 hari
a. Wawancara tingkat Desa/RW/RT	
b. FGD	
c. Survei lapangan	
Input data hasil survei pada tabel baseline numerik	2 hari
Analisis baseline (kondisi kekumuhan, legalitas lahan, pertimbangan lain)	2 hari
Penyusunan Hasil Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh	5 hari
Total	14 hari
Lokasi kumuh yang memiliki baseline numerik	
Koordinasi dengan Pokja PKP Kota/Kab	2 hari
Verifikasi infrastruktur yang telah dibangun	3 hari
Update baseline kawasan kumuh	2 hari
Analisis baseline (kondisi kekumuhan, legalitas lahan, pertimbangan lain)	2 hari
Penyusunan Hasil Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh	5 hari
Total	14 hari

Pada tahap identifikasi dan penilaian tingkat kekumuhan, akan dinilai sesuai kriteria per aspek dengan tahapan berikut:

1. Menghitung numerik kumuh berdasarkan rumus perhitungan yang dibagi ke dalam bentuk baseline untuk setiap kriteria per aspek.
2. Merangkum hasil perhitungan numerik kumuh ke dalam Daftar Isian Indikator Numerik Kumuh
3. Perhitungan tingkat kekumuhan dan penentuan skala prioritas kekumuhan

3.3 PERHITUNGAN NUMERIK KUMUH

3.3.1 KEBUTUHAN DATA NUMERIK

Sebelum melakukan perhitungan dan input baseline, terdapat beberapa data yang dibutuhkan yang termuat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2 Kebutuhan Data Numerik Kumuh

Provinsi (2)	:		Jumlah KK (7)	:		KK
Kota/Kabupaten (3)	:		Jumlah Penduduk Laki-Laki (8)	:		Jiwa
Kecamatan (4)	:		Jumlah Penduduk Perempuan (9)	:		Jiwa
Kelurahan/Desa (5)	:		Luas Permukiman (11)	:		Ha
RT/RW (6)	:		Jumlah Bangunan (12)	:		Unit
<i>*Data yang diisi merupakan data valid dan dapat dipertanggung jawabkan</i>						
1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG					Numerik	
	Jumlah bangunan tidak teratur* (14)					
	<i>*Berada diatas sungai/laut/rawa/danau; berada di daerah buangan limbah pabrik; berada dibawah saluran tegangan tinggi (sutet); tidak memiliki akses langsung ke jalan (terhalang oleh bangunan lain</i>					Unit

	Luas kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai dengan ketentuan* (15) <i>*Kepadatan lebih dari 200-250 unit/Ha</i>		Ha
	Jumlah bangunan hunian tidak memenuhi persyaratan teknis* (16) <i>*Kondisi atap bangunan bocor; lantai bangunan berupa tanah; Kondisi dinding bangunan rusak</i>		Unit
1. ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN			
	Total panjang jalan lingkungan (lebar > 1,5 m) terbangun / eksisting (17)		m'
	Total panjang jalan lingkungan kondisi ideal (18)		m'
	Total panjang jalan yang dibutuhkan untuk area belum terlayani (19)		m'
	Total panjang jalan kondisi rusak (20)		m'
2. ASPEK KONDISI PELAYANAN AIR MINUM			
	Jumlah KK tidak dapat mengakses air minum aman (tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa) (21)		KK
	Jumlah masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimal 60liter/org/hari (22)		KK

3. ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN			
	Total panjang drainase (23)		m'
	Total panjang drainase kondisi ideal (24)		m'
	Luas Area terjadi genangan/banjir (25)		Ha
	Total panjang drainase yang dibutuhkan untuk area belum terlayani (26)		m'
	Total panjang jaringan drainase kondisi buruk/ tidak berfungsi baik (27)		m'
4. ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH			
	Jumlah KK dengan sistem pengelolaan air limbah yang tidak terhubung dengan tangki septik (28) <i>* Buangan limbah rumah tangga menyatu dengan saluran drainase lingkungan; Kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik</i>		KK
	Jumlah KK dengan kondisi sarana prasarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis* (29) <i>* Tidak memiliki jamban sendiri/jamban bersama (5 KK/jamban)</i>		KK

5. ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
	<p>Jumlah KK dengan kondisi sarana prasarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis* (30)</p> <p><i>*Tidak memiliki tempat pembuangan sampah pribadi, komunal; Pengelolaan sampah dengan cara dibakar; Tidak memiliki tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan</i></p>		KK
	<p>Jumlah KK dengan sistem pengelolan persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis (31)</p> <p><i>*Pembuangan sampah dilakukan di ruang terbuka/lahan kosong/jalan/area yang bukan peruntukannya; Pengangkutan sampah ke TPS/TPA kurang dari 1 (satu) kali dalam seminggu</i></p>		KK
6. ASPEK KONDISI PENGAMANAN BAHAYA KEBAKARAN			
	<p>Jumlah bangunan hunian tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran (32)</p> <p><i>* Tidak memiliki penyediaan pasokan air (bak/kolam penampungan air, sumur dalam/hidran); tidak memiliki Pos Kebakaran Lingkungan dan alat pendukungnya</i></p>		Unit
	<p>Jumlah bangunan hunian tidak memiliki sarana proteksi (33)</p> <p><i>*tidak memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</i></p>		Unit
7. ASPEK LEGALITAS PENDIRIAN BANGUNAN			
	<p>Jumlah bangunan hunian memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) (34)</p>		Unit

	Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (36)		Unit
8. ASPEK KEPADATAN PENDUDUK			
	Luas wilayah RT (38)		Ha
10 ASPEK MATA PENCAHARIAN PENDUDUK			
	Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan (39)		Unit
	Perikanan/nelayan (40)		Unit
	Pertambangan/galian (41)		Unit
	Industri/pabrik (42)		Unit
	Konstruksi/bangunan (43)		Unit
	Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) (44)		Unit
	Pegawai pemerintah (45)		Unit
11 ASPEK PERTIMBANGAN FUNGSI STRATEGIS LOKASI			
	Lokasi "berada" pada fungsi strategis Kabupaten atau Kota (46)	Ya/Tidak	

12 ASPEK POTENSI SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA UNTUK DIKEMBANGKAN			
	Lokasi "memiliki" Potensi Sosial, ekonomi, budaya untuk dikembangkan (48)	Ya/Tidak	

3.3.2 RUMUS PERHITUNGAN NUMERIK KUMUH

Rumus Perhitungan Numerik Kumuh adalah membuat baseline untuk masing-masing kriteria per aspek sebagai acuan dalam melakukan penilaian yang sudah disesuaikan dengan rumus dan satuannya. Berikut adalah rincian dari baseline dan rumus perhitungan kriteria kekumuhan:

Tabel 3. 3 Rumusan Perhitungan Numerik Kumuh

Aspek	Kriteria	Baseline	Rumus Perhitungan
1. Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Jumlah bangunan tidak teratur (unit)	$\frac{\sum \text{bangunan tidak teratur (unit)}}{\sum \text{bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$
	Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang	Luas kawasan 200/250 < (unit/ha)	$\frac{\text{luas kawasan 200/250} <}{\text{luas kawasan kumuh}} \times 100\%$

Aspek	Kriteria	Baseline	Rumus Perhitungan
	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Jumlah bangunan tidak sesuai persyaratan teknis (unit)	$\frac{\sum \text{bangunan tidak sesuai persyaratan teknis (unit)}}{\sum \text{bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$
2. Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang jalan ideal (m) • Panjang jalan existing (m) 	$\frac{\text{Panjang jalan ideal (m)} - \text{Panjang jalan eksisting (m)}}{\text{Panjang jalan ideal (m)}} \times 100\%$
	Kualitas permukaan jalan lingkungan	Panjang jalan rusak (m)	$\frac{\text{Panjang jalan rusak}}{\text{Panjang jalan ideal}} \times 100\%$
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan akses aman air minum	Jumlah KK tidak terakses air minum aman	$\frac{\sum \text{KK tidak terakses air minum aman}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$
	Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum	Jumlah KK tidak terakses air minum cukup	$\frac{\sum \text{KK tidak terakses air minum cukup}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$
4. Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	Luas kawasan yang terkena genangan (Ha)	$\frac{\text{Luas kawasan yang terkena genangan (Ha)}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (Ha)}} \times 100\%$

Aspek	Kriteria	Baseline	Rumus Perhitungan
	Ketidaksediaan drainase	<ul style="list-style-type: none"> Panjang drainase ideal (m) Panjang drainase existing (m) 	$\frac{\text{Panjang drainase ideal (m)} - \text{Panjang drainase existing (m)}}{\text{Panjang drainase ideal (m)}} \times 100\%$
	Kualitas konstruksi drainase	Panjang drainase yang buruk (m)	$\frac{\text{Panjang drainase yang buruk}}{\text{Panjang drainase ideal}} \times 100\%$
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	Jumlah KK dengan sistem air limbah tidak sesuai dengan standar teknis	$\frac{\sum \text{KK dengan sistem air limbah tidak sesuai standar teknis}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Jumlah KK dengan sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	$\frac{\sum \text{KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai standar teknis}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan sarana persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Jumlah KK dengan prasarana dan sarana sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis	$\frac{\sum \text{KK dengan sarpras persampahan tidak sesuai standar teknis}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$

Aspek	Kriteria	Baseline	Rumus Perhitungan
	Sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis	Jumlah KK dengan sistem pengelolaan sampah tidak sesuai standar teknis	$\frac{\sum \text{KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis}}{\sum \text{KK kseseluruhan}} \times 100$
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaksediaan prasarana proteksi kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran (unit)	$\frac{\sum \text{bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran (unit)}}{\sum \text{bangunan kseseluruhan (unit)}} \times 100\%$
	Ketidaksediaan sarana proteksi kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran (unit)	$\frac{\sum \text{bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran (unit)}}{\sum \text{bangunan kseseluruhan (unit)}} \times 100\%$

3.3.3 DATA ISIAN INDIKATOR NUMERIK KEKUMUHAN

Hasil perhitungan data numerik dari baseline yang telah dinilai sesuai dengan ketentuan selanjutnya akan disusun dalam bentuk format resume data numerik seperti berikut:

Tabel 3. 4 Data Isian Indikator Numerik Kekumuhan

Kawasan	:		Luas SK	:		Ha
Kelurahan	:		Luas	:		Ha
Kecamatan	:		Verifikasi	:		Ha
Kab/Kota	:		Jumlah	:		Unit
Propinsi	:		Bangunan	:		Unit
			Jumlah	:		jiwa
			Penduduk	:		KK
			Jumlah KK	:		KK
1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG						Numerik
a.		Ketidakteraturan bangunan	§	Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan		Unit
b.		Tingkat Kepadatan Bangunan	§	Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan		Ha
c.		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	§	Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis		Unit
2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN						
a.			§	Panjang jalan ideal		m'

	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	§	Panjang jalan existing		m'
b.	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	§	Panjang jalan dengan permukaan rusak		m'
3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM					
a.	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	§	Jumlah KK tidak terakses air minum aman		KK
b.	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	§	Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya		KK
4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN					
a.	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	§	Luas kawasan yang terkena genangan		Ha
b.	Ketidaksediaan Drainase	§	Panjang drainase ideal		m'
		§	Panjang saluran drainase existing		m'
c.	Kualitas Konstruksi Drainase	§	Panjang saluran drainase rusak		m'
5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH					
a.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	§	Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis		KK
b.		§			KK

	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis		
6	ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
a.	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	§	Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis		KK
b.	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	§	Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis		KK
7	ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN				
a.	Ketidaksediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	§	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran		Unit
b.	Ketidaksediaan Sarana Proteksi Kebakaran	§	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran		Unit

3.4 PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN

Setiap aspek dan indikator yang telah diketahui numerik dan persentasenya, maka dilakukan penilaian skor/pembobotan berdasarkan besarnya nilai persentase kriteria dalam menentukan tingkat kekumuhan lokasi (kumuh berat, kumuh sedang dan kumuh ringan).

3.4.1 PERHITUNGAN DARI KONDISI KEKUMUHAN

Tabel 3. 5 Perhitungan Tingkat Kekumuhan dari Segi Kondisi Kekumuhan

No	Kriteria	Parameter	Nilai
Aspek Bangunan Gedung			
1	Ketidakteraturan Bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1
2	Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang	76%-100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5
		51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3
		25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1

No	Kriteria	Parameter	Nilai
3	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1
Aspek Jalan Lingkungan			
1	Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	76% - 100% area tidak terlayani oleh jalan lingkungan	5
		51% - 75% area tidak terlayani oleh jalan lingkungan	3
		25% - 50% area tidak terlayani oleh jalan lingkungan	1
2	Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	76%-100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5
		51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3
		25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1
Aspek Penyediaan Air Minum			
1	Akses aman air minum tidak tersedia	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5
		51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3

No	Kriteria	Parameter	Nilai
		25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1
2	Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5
		51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3
		25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1
Aspek Drainase Lingkungan			
1	Drainase lingkungan tidak tersedia	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5
		51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3
		25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1
2	Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	76% - 100% area terjadi genangan >30cm, >2 jam dan >2x setahun	5
		51% - 75% area terjadi genangan >30cm, >2 jam dan >2x setahun	3
		25% - 50% area terjadi genangan >30cm, > 2 jam dan >2x setahun	1

No	Kriteria	Parameter	Nilai
3	Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5
		51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3
		25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1
Aspek Pengelolaan Air Limbah			
1	Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5
		51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3
		25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1
2	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5
		51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3
		25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1

No	Kriteria	Parameter	Nilai
Aspek Pengelolaan Persampahan			
1	Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5
		51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3
		25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1
2	Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3
		25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1
Aspek Proteksi Kebakaran			
1	Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5
		51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3
		25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1
2		76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5
		51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3

No	Kriteria	Parameter	Nilai
	Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1

3.4.2 PERHITUNGAN DARI SEGI LEGALITAS LAHAN

Tabel 3. 6 Perhitungan Tingkat Kekumuhan dari Segi Legalitas Lahan

No	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
1	Kejelasan status penguasaan lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis	Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)
			Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)

No	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
		antara pemegang hak atas tanah dengan pemanfaat tanah		
2	Ketentuan RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(+)
			Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(-)

3.4.3 PERHITUNGAN DARI SEGI PERTIMBANGAN LAIN

Tabel 3. 7 Perhitungan Tingkat Kekumuhan dari Segi Pertimbangan Lain

No	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
1	Nilai strategis lokasi	Letak lokasi perumahan atau permukiman pada: 1. fungsi strategis kabupaten/kota; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	5
			Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	1

No	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
2	Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: 1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151–200 jiwa/ha; 3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201–400 jiwa/ha; 4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Metropolitan & Kota Besar Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha • Untuk Kota Sedang & Kota Kecil Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha 	5
			Kepadatan Penduduk pada Observasi Lokasi sebesar 151 - 200 Jiwa/Ha	3
			Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha	1
3	Kondisi sosial, ekonomi dan budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; 2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;	Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi, dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara	5
			Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	1

No	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai
		3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.		

3.4.4 PENENTUAN SKALA PENANGANAN PRIORITAS

Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan tersebut di atas, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi prioritas sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 8 Formula Penentuan Skala Penanganan Prioritas

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
60 - 80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38 - 59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16 - 37	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Ilegal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																			

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		11 - 15	Tinggi	X	X					X	X					X	X		
6 - 10	Sedang			X	X					X	X					X	X		
1 - 5	Rendah					X	X					X	X					X	X
SKALA PENANGANAN PRIORITAS		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi kekumuhan yaitu:

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;

17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

1. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
2. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
3. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
4. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
5. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
6. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
7. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
8. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
9. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

3.4.5 TINGKAT KECUMUHAN AWAL

Hasil identifikasi dan penilaian dari numerik kumuh dirangkum juga dalam bentuk tabel seperti di bawah sehingga lebih mudah dipahami. Adapun isian tabel kekumuhan awal adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Tingkat Kekumuhan Awal

Provinsi	:	Luas SK	Ha
Kab/Kota	:	Luas Verifikasi	Ha
Kecamatan	:	Jumlah Bangunan	Unit
Kawasan	:	Jumlah Penduduk	Jiwa
		Jumlah KK	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PERSEN	NILAI
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan		Unit		
	b. Kepadatan Bangunan		Ha		
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan		Unit		
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung					
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan		Meter		
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan		Meter		

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PERSEN	NILAI
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan					
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum		KK		
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum		KK		
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum					
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air		Ha		
	b. Ketidaksediaan Drainase		Meter		
	c. Kualitas Konstruksi Drainase		Meter		
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan					
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis		KK		
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis		KK		
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah					

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PERSEN	NILAI
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis		KK		
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis		KK		
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan					
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaksediaan Prasarana Proteksi Kebakaran		Unit		
	b. Ketidaksediaan Sarana Proteksi Kebakaran		Unit		
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran					
BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN			TOTAL NILAI		
60 - 80: KUMUH BERAT			TINGKAT KEKUMUHAN		
38 - 59: KUMUH SEDANG			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		
16 – 37: KUMUH RINGAN					
< 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH					

IV. SIMULASI IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN KUMUH

Di kawasan kumuh Kampung Inggris telah dilakukan survei dan telah dikumpulkan data *baseline* sehingga dapat dilakukan identifikasi dan penilaian dari lokasi kumuh.

1. PERHITUNGAN NUMERIK KUMUH

Aspek	Kriteria	Baseline	Jumlah
1. Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Jumlah bangunan tidak teratur (unit)	3
	Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang	Luas kawasan $200/250 <$ (unit/ha)	0
	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Jumlah bangunan tidak sesuai persyaratan teknis (unit)	198
2. Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang jalan ideal (m) • Panjang jalan existing (m) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal = 26,436 • Existing = 21,645
	Kualitas permukaan jalan lingkungan	Panjang jalan rusak (m)	8,459
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan akses aman air minum	Jumlah KK tidak terakses air minum aman	1,394
	Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum	Jumlah KK tidak terakses air minum cukup	25

Aspek	Kriteria	Baseline	Jumlah
4. Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	Luas kawasan yang terkena genangan (Ha)	2,795
	Ketidaksediaan drainase	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang drainase ideal (m) • Panjang drainase existing (m) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal = 22,720 • Existing = 8,684
	Kualitas konstruksi drainase	Panjang drainase yang buruk (m)	5,530
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	Jumlah KK dengan sistem air limbah tidak sesuai dengan standar teknis	43
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Jumlah KK dengan sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	649
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan sarana persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Jumlah KK dengan prasarana dan sarana sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis	1630
	Sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis	Jumlah KK dengan sistem pengelolaan sampah tidak sesuai standar teknis	1102
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaksediaan prasarana proteksi kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran (unit)	0
	Ketidaksediaan sarana proteksi kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran (unit)	1,540

2. DAFTAR ISIAN INDIKATOR NUMERIK KEKUMUHAN

Hasil perhitungan data numerik dari *baseline* yang telah dinilai akan disusun dalam bentuk format resume data numerik berikut:

Kawasan	:	Tulungrejo	Luas SK	:	82.31	Ha
Kelurahan	:	Tulungrejo	Luas Verifikasi	:	82.31	Ha
Kecamatan	:	PARE	Jumlah Bangunan	:	1540	Unit
Kab/Kota	:	KAB. KEDIRI	Jumlah Penduduk	:	5764	jiwa
Propinsi	:	JAWA TIMUR	Jumlah KK	:	1700	KK
1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG					Numerik	
a.		Ketidakteraturan bangunan	§	Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan	3.00	Unit
b.		Tingkat Kepadatan Bangunan	§	Luas Kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	-	Ha
c.		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	§	Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	198	Unit
2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN						
a.		Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	§	Panjang jalan ideal	26,436.00	m'
			§	Panjang jalan existing	21,645.00	m'
b.		Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	§	Panjang jalan dengan permukaan rusak	8,459.00	m'
3 ASPEK KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM						

a.	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	§	Jumlah KK tidak terakses air minum aman	1,394.00	KK
b.	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	§	Jumlah KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	25.00	KK
4 ASPEK KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN					
a.	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	§	Luas kawasan yang terkena genangan	2.80	Ha
b.	Ketidaksediaan Drainase	§	Panjang drainase ideal	22,720.00	m'
			Panjang saluran drainase existing	8,684.00	m'
c.	Kualitas Konstruksi Drainase	§	Panjang saluran drainase rusak	5,530.0	m'
5 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH					
a.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	§	Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis	43	KK
b.	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	§	Jumlah KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	649	KK
6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
a.	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	§	Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tdk sesuai persyaratan teknis	1630	KK
b.	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	§	Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	1102	KK
7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN					

a.	Ketidaksediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	§	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	-	Unit
b.	Ketidaksediaan Sarana Proteksi Kebakaran	§	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	1,540	Unit

3. PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN

Bangunan Gedung					
ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PERSEN	NILAI
KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	3.00	Unit	0.19%	0
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	198.00	Unit	12.86%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				0.00%	

Keterangan:

- a) Data numerik jumlah tidak memiliki keteraturan dan jumlah bangunan tidak sesuai dengan persyaratan teknis adalah 3 dan 198 unit, dimasukkan ke dalam kolom volume.

- b) Persentase ketidakteraturan bangunan dihitung dengan rumus $\frac{\sum \text{bangunan tidak teratur (unit)}}{\sum \text{bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100$ atau $\frac{3}{1,540} \times 100\%$ sehingga menghasilkan persentase 0.19%.
- c) Persentase ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan dihitung dengan rumus $\frac{\sum \text{bangunan tidak sesuai persyaratan teknis (unit)}}{\sum \text{bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$ atau $\frac{198}{1,540} \times 100\%$ sehingga menghasilkan persentase 12.86%.
- d) Nilai “0” pada ketidakteraturan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan dikarenakan hasil persentase 0.19% dan 12.86% berada di bawah klasifikasi parameter 25%.

Jalan Lingkungan

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PERSEN	NILAI
Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	4,791.00	Meter	18.12%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	8,459.00	Meter	32.00%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				16.00%	

Keterangan:

- a) Data numerik cakupan pelayanan jalan lingkungan dan kualitas permukaan jalan lingkungan adalah 4,791 dan 8,459 meter, dimasukkan ke dalam kolom volume.

- b) Persentase cakupan pelayanan jalan lingkungan dihitung dengan rumus $\frac{\text{Panjang jalan ideal (m)} - \text{Panjang jalan eksisting (m)}}{\text{Panjang jalan ideal (m)}} \times 100\%$ atau $\frac{26,436 - 21,645}{26,436} \times 100$ sehingga menghasilkan persentase 18.12%.
- c) Persentase kualitas permukaan jalan lingkungan dihitung dengan rumus $\frac{\text{Panjang jalan rusak}}{\text{Panjang jalan ideal}} \times 100\%$ atau $\frac{8,459}{26,436} \times 100$ sehingga menghasilkan persentase 32%.
- d) Nilai cakupan pelayanan jalan lingkungan adalah “0” karena persentase 18.12% berada di bawah klasifikasi parameter 25%.
- e) Nilai kualitas permukaan jalan lingkungan adalah “1” karena persentase 32% berada di antara klasifikasi parameter 25%-50%.

Penyediaan Air Minum

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PERSEN	NILAI
Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1,394.00	KK	82.00%	5
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	25.00	KK	1.47%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				41.00%	

Keterangan:

- a) Data numerik ketersediaan akses aman air minum dan tidak terpenuhinya kebutuhan air minum adalah 1,394 dan 25 KK, dimasukkan ke dalam kolom volume.
- b) Persentase ketersediaan akses aman air minum dihitung dengan rumus $\frac{\sum KK \text{ tidak terakses air minum aman}}{\sum KK \text{ keseluruhan}} \times 100\%$ atau $\frac{1,394}{1,700} \times 100$ sehingga menghasilkan persentase 82%.
- c) Persentase tidak terpenuhinya kebutuhan air minum dihitung dengan rumus $\frac{\sum KK \text{ tidak terakses air minum cukup}}{\sum KK \text{ keseluruhan}} \times 100\%$ atau $\frac{25}{26,436} \times 100$ sehingga menghasilkan persentase 1.47%.
- d) Nilai ketersediaan akses aman air minum adalah “5” karena persentase 82% berada di antara klasifikasi parameter 76-100%.
- e) Nilai tidak terpenuhinya kebutuhan air minum adalah “0” karena persentase 1.47% berada di bawah klasifikasi parameter 25%.

Drainase Lingkungan

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PERSEN	NILAI
Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	2.80	Ha	3.40%	0
	b. Ketidaksediaan Drainase	14,036.00	Meter	61.78%	3
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	5,530.00	Meter	24.34%	0

Keterangan:

- a) Data numerik ketidakmampuan mengalirkan limpasan air adalah 2,8Ha, dimasukkan ke dalam kolom volume.
- b) Data numerik ketidaksediaan drainase adalah 14,036 meter, dimasukkan ke dalam kolom volume.
- c) Data numerik kualitas konstruksi drainase adalah 5,530 meter, dimasukkan ke dalam kolom volume.
- d) Persentase ketidakmampuan mengalirkan limpasan air dihitung dengan rumus $\frac{\text{Luas kawasan yang terkena genangan (Ha)}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (Ha)}} \times 100\%$ atau $\frac{2,8}{82,31} \times 100$ dan menghasilkan persentase 3.4%.
- e) Persentase ketidaksediaan drainase adalah dihitung dengan rumus $\frac{\text{Panjang drainase ideal (m)} - \text{Panjang drainase existing (m)}}{\text{Panjang drainase ideal (m)}} \times 100\%$ atau $\frac{22,720 - 8,684}{22,720} \times 100$ menghasilkan persentase 61,78%.
- f) Persentase ketidakmampuan mengalirkan limpasan air adalah dihitung dengan rumus $\frac{\text{Panjang drainase yang buruk}}{\text{Panjang drainase ideal}} \times 100\%$ atau $\frac{5,530}{22,720} \times 100$ sehingga menghasilkan persentase 24,34%.
- g) Nilai ketersediaan ketidaksediaan drainase adalah "3" karena persentase 61,78% berada di antara klasifikasi parameter 51-75%.
- h) Nilai ketidakmampuan mengalirkan limpasan air dan kualitas konstruksi drainase adalah "0" karena persentase 3,4% dan 24,34% berada di bawah klasifikasi parameter 25%.

Pengelolaan Air Limbah

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PERSEN	NILAI
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	43.00	KK	2.53%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	649.00	KK	38.18%	1

Keterangan:

- Data numerik sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis adalah 43 KK, dimasukkan ke dalam kolom volume.
- Data numerik prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis adalah 649 KK, dimasukkan ke dalam kolom volume.
- Persentase sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis dihitung dengan rumus $\frac{\sum KK \text{ dengan sistem air limbah tidak sesuai standar teknis}}{\sum KK \text{ keseluruhan}} \times 100\%$ atau $\frac{43}{1,700} \times 100$ dan menghasilkan persentase 2.53%.
- Persentase prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis adalah dihitung dengan rumus $\frac{\sum KK \text{ dengan sarpras air limbah tidak sesuai standar teknis}}{\sum KK \text{ keseluruhan}} \times 100\%$ atau $\frac{649}{1,700} \times 100$ sehingga menghasilkan persentase 38,18%.

- e) Nilai sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis adalah “0” karena persentase 2,53% berada di bawah klasifikasi parameter 25%.
- f) Nilai prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis adalah “1” karena persentase 38,18% berada di antara klasifikasi parameter 25-50%.

Pengelolaan Persampahan

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PERSEN	NILAI
Kondisi Pengelolaan Persampahan	c. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1,630.00	KK	95.88%	5
	d. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	1,102.00	KK	64.82%	3

Keterangan:

- a) Data numerik prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis adalah 1,630 KK, dimasukkan ke dalam kolom volume.
- b) Data numerik sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis adalah 1,102 KK, dimasukkan ke dalam kolom volume.

- c) Persentase prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dihitung dengan rumus $\frac{\sum KK \text{ dengan sarpras persampahan tidak sesuai standar teknis}}{\sum KK \text{ keseluruhan}} \times 100\%$ atau $\frac{1,630}{1,700} \times 100$ dan menghasilkan persentase 95,88%.
- d) Persentase sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis adalah dihitung dengan rumus $\frac{\sum KK \text{ dengan sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis}}{\sum KK \text{ keseluruhan}} \times 100\%$ atau $\frac{1,102}{1,700} \times 100$ menghasilkan persentase 64,82%.
- e) Nilai prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis adalah “5” karena persentase 95,88% berada di antara klasifikasi parameter 76-100%.
- f) Nilai sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis adalah “3” karena persentase 64,82% berada di antara klasifikasi parameter 51-75%.

Proteksi Kebakaran

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		VOLUME	SATUAN	PERSEN	NILAI
Kondisi Proteksi Kebakaran	c. Ketidaksediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0.00%	0
	d. Ketidaksediaan Sarana Proteksi Kebakaran	1,540.00	Unit	100.00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				50.00%	

Keterangan:

- a) Data numerik ketidaksediaan sarana proteksi kebakaran adalah 1,540 KK, dimasukkan ke dalam kolom volume.
- b) Persentase ketidaksediaan sarana proteksi kebakaran dihitung dengan rumus $\frac{\sum \text{bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran (unit)}}{\sum \text{bangunan kseseluruhan (unit)}} \times 100\%$ atau $\frac{1,540}{1,540} \times 100$ dan menghasilkan persentase 100%.
- c) Nilai ketidaksediaan sarana proteksi kebakaran adalah “5” karena persentase 100% berada di antara klasifikasi parameter 76-100%.

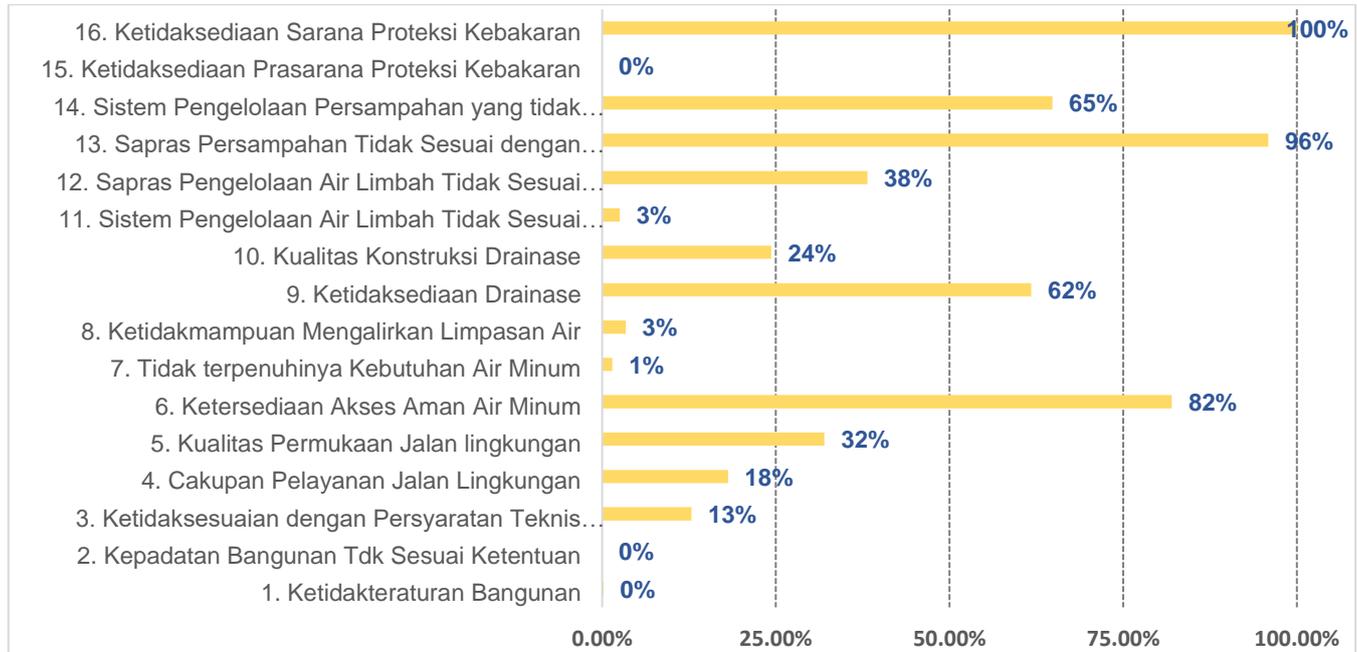
Tingkat Kekumuhan Awal

Setelah diketahui semua skor setiap indikator kumuh, selanjutnya dijumlahkan agar didapatkan tingkat kekumuhan di dalam kawasan tersebut:

Total Nilai	23
Tingkat Kekumuhan	Kumuh Ringan
Rata-Rata Kekumuhan Sektoral	27.43%

4. GRAFIK MASALAH KEKUMUHAN AWAL

Kekumuhan awal yang telah dihitung akan ditampilkan secara grafik untuk memperlihatkan persentase seluruh indikator. Berikut adalah contoh grafik kekumuhan awal sesuai perhitungan yang telah dilakukan di atas:



V. PENUTUP

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan permukiman di perkotaan dan perdesaan memberikan dampak bagi pola kehidupan masyarakat. Tingginya jumlah penduduk pada suatu wilayah berbanding lurus dengan permintaan akan hal kebutuhan akan tempat hunian yang layak. Sebagian besar, kondisi perkembangan hunian yang tidak terkontrol tidak sebanding dengan ketersediaan lahan dan infrastruktur yang ada. Hal ini dapat berdampak pada kualitas permukiman yang menjadi kumuh dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kegiatan Kota Tanpa Kumuh menjadi panduan dalam menyediakan standar teknis demi terwujudnya peningkatan kualitas permukiman pada kawasan kumuh. Data-data dan tata cara penilaian kumuh diharapkan menjadi basis data oleh Pemerintah Kota/Kabupaten dan masyarakat untuk menetapkan target dan merencanakan program peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh

**BUKU SAKU
IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN
LOKASI KUMUH KEGIATAN KOTAKU
TAHUN 2022**

PENGARAH

J. Wahyu Kusumosusanto

KONTRIBUTOR

Valentina

Winda Laksana

Haris Pujogiri

Aris M. Budiawan

Eko Priantono

Roofy Reizkapuni

Ade Prasetyo K.

Iriyanti Najamuddin

Azwar Aswad Harahap

Pipit Prayogo

Alifiah Devi Rahmawati

Diterbitkan oleh

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Direktorat Jenderal Cipta Karya

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Download Buku:

